

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar Tahun 2017

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam aspek pengembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa angka putus sekolah masih selalu memperhatikan bangsa Indonesia mengingat bahwa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan di berbagai jenjang pendidikan. Banyaknya angka putus sekolah di Indonesia menjadi cerminan bahwa anak bangsa masih memerlukan adanya sebuah proses pembelajaran atau pendidikan mulai pendidikan sejak dini hingga pendidikan lanjut namun masih memiliki faktor-faktor tertentu yang menyebabkan putusnya jenjang pendidikan. Faktor-faktor seperti lingkungan dan kemampuan materiil masih menjadi salah satu penyebab banyaknya angka putus sekolah.

Kebutuhan akan pendidikan tidak hanya bagi mereka yang mampu, baik secara materi, kondisi social budaya, ataupun kondisi fisik. Pendidikan merupakan hak anak bangsa yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah. Melalui Program Indonesia Pintar diharapkan semakin banyak anak usia sekolah yang memperoleh pendidikan dan menurunnya angka putus sekolah. Setelah pada bab sebelumnya telah dibahas sedikit mengenai Program Indonesia Pintar, pada bab ini penulis akan membahas isi atau pembahasan daripada hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap mengenai Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap pada Program Indonesia Pintar Tahun 2017.

Cilacap merupakan salah satu Kabupaten yang kaya akan sumber daya alamnya, akan tetapi sumberdaya alam yang cukup tidak berbanding lurus dengan pendidikan yang didapatkan. Cilacap merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki angka putus sekolah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan walau berbeda jenjang pendidikan. Faktor lingkungan dan faktor kemampuan secara materiil menjadi salah satu penyebab putusnya jenjang pendidikan. Hal tersebut menjadikan bahwa peran pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan haruslah lebih diperhatikan mengingat bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak bangsa dan cikal bakal atau dasar ilmu untuk memajukan putra-putri bangsa.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas peran Pemerintah Daerah khususnya Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar di Cilacap Tahun 2017. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran memiliki arti sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republi

Indonesia Tahun 1945. Maksud dari Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara Program Indonesia Pintar dimana dalam hal tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Tugas atau Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar yaitu untuk tercapainya tujuannya dalam mengurangi angka putus sekolah di Daerah atau wilayah Kabupaten Cilacap. Berikut hasil penelitian penulis mengenai Peran Dinas Pendidikan dan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar Tahun 2017:

5.2 Mengusulkan Peserta Didik Calon Penerima Dana PIP Dari Satuan Pendidikan Di Kabupaten Cilacap

Peran Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang pertama adalah mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP dari satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Cilacap. Penjelasan lain dalam peran ini adalah menyampaikan atau meneruskan usulan siswa calon penerima dari sekolah melalui aplikasi pengusulan PIP, data usulan di Dapodik sekolah, dan usulan dari satuan pendidikan nonformal ke direktorat teknis. Selain itu mengusulkan usulan dari pimpinan SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan

nonformal, setelah data terverifikasi, yang selanjutnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dan terakhir adalah menginformasikan atau menyampaikan Surat Keputusan (SK) dan daftar peserta didik penerima PIP kepada sekolah atau lembaga. Pada hakekatnya dalam peran ini sama halnya seperti alur atau proses awal pengusulan peserta didik calon penerima PIP sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ibu Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Peran kami sebagai pemerintah daerah dalam mengusulkan peserta didik itu sebenarnya sama saja dalam alur atau proses pencalonan penerima PIP yang ada pada buku petunjuk teknis pelaksanaan PIP mas, kami sebagai pemerintah itu berperan menyampaikan atau meneruskan usulan calon siswa. Jadi data yang kami dapat itu sudah ada dari sekolah mas, dan sekolah sebenarnya pun sebelumnya berperan untuk mendata siswanya. Nah, dari data yang kami terima lalu kami sampaikan ke Pemerintah Pusat atau Dapodik melalui aplikasi berbasis online, lalu setelah Dapodik memverivikasi data yang sudah kami usulkan kami akan ada pemberitahuan setelah itu barulah SK akan turun dan kami akan sampaikan kepada setiap sekolah mas. Jadi sebetulnya peran kami sebagai jembatan komunikasi lebih tepatnya antara masyarakat dan pemerintah pusat, kan sebetulnya Kartu Indonesia Pintar pun yang membuat itu pusat mas bukan di Pemerintah Daerah, jadi pusat pun sudah memiliki data-data calon penerima PIP, hanya saja masih perlu berkoordinir langsung dengan sekolah sebagai penentu seperti benar atau tidak bahwa siswa tersebut pantas dan berhak menerima PIP atau tidaknya.”

Pernyataan Ibu Dwi Yulianti di atas menjelaskan bahwa penyaluran Program Indonesia Pintar berawal dari pengusulan calon peserta didik yang disampaikan oleh masing-masing pihak sekolah yang kemudian data tersebut akan diverivikasi oleh Dinas dan setelah mendapat verivikasi Dapodik maka akan turun Surat Keputusan atau SK yang mana isi dalam SK tersebut adalah langkah-langkah dan pemberitahuan

penerimaan Program Indonesia Pintar kepada peserta didik terpilih. Adapun beberapa data pengusulan nama-nama siswa yang diusulkan dari pihak sekolah masing-masing kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang nantinya akan dikirim oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap kepada Dapodik yang kemudian akan diverifikasi oleh Dapodik sebagai data nama siswa calon penerima dana bantuan Program Indonesia Pintar:

Tabel 5.1
Beberapa Daftar Nama Siswa Usulan dan Terverifikasi Penerima Dana
Program Indonesia Pintar di Kabupaten Cilacap Tahun 2017

No	Nama Siswa	Nama Sekolah	Kecamatan	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	NISN
1	ANDRIYANTO	SD KRISTEN ADIRAJA	Kec. Adipala	L	12/19/2003	0038993470
2	ANJAR BIMANTORO	SD KRISTEN ADIRAJA	Kec. Adipala	L	5/17/2004	0046531981
3	PURWATI	SD KRISTEN ADIRAJA	Kec. Adipala	P	6/5/2004	0046531982
4	WIJI ASTUTI	SD KRISTEN ADIRAJA	Kec. Adipala	P	4/23/2004	0046531978
5	ALDI APRIANTO	SD KRISTEN ADIRAJA	Kec. Adipala	L	4/20/2003	0038993595
6	PUJIAH RESTIANI	SD KRISTEN ADIRAJA	Kec. Adipala	P	4/26/2004	0046531979
7	HARDIANTORO	SD KRISTEN ADIRAJA	Kec. Adipala	L	3/6/2004	0046531977
8	OKTAVIANUS JONATHAN TANI	SD KRISTEN ADIRAJA	Kec. Adipala	L	7/21/2003	0038993468
9	ANDIKA ADI PRASETYA	SD KRISTEN ADIRAJA	Kec. Adipala	L	3/3/2004	0046531976

10	AAN WIJI RUDIANTO	SD NEGERI ADIPALA 01	Kec. Adipala	L	12/9/2003	0033624056
11	ARDI PRAYOGA	SD NEGERI ADIPALA 01	Kec. Adipala	L	9/9/2003	0037656008
12	EGI SETIAWAN	SD NEGERI ADIPALA 01	Kec. Adipala	L	1/15/2004	0045782268
13	FADHILA YASMIN	SD NEGERI ADIPALA01	Kec. Adipala	P	7/2/2004	0049176177
14	EGA DWI PANGGA	SD NEGERI ADIPALA 01	Kec. Adipala	L	4/18/2002	0029405751
15	RIZKY AGUNG PAMUJI	SD NEGERI ADIPALA 01	Kec. Adipala	L	4/30/2003	0036883184
16	SHEVIANA WARDANI	SD NEGERI ADIPALA 01	Kec. Adipala	P	3/30/2004	0047320507
17	TIYASTIN RAHMA WINASIH	SD NEGERI ADIPALA 01	Kec. Adipala	P	7/21/2003	0035663328
18	RIDWAN SYAEFULLOH	SD NEGERI ADIPALA 01	Kec. Adipala	L	4/2/2002	0021960055
19	NINIK ISNAWATI	SD NEGERI ADIPALA 01	Kec. Adipala	P	8/25/2003	0038374114
20	REZA ADITYA PRATAMA	SD NEGERI ADIPALA 01	Kec. Adipala	L	12/22/2004	0042906388

(Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017)

5.3 Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan PIP Di Kabupaten Cilacap

Sosialisasi tidak dapat terlepas dari suatu kegiatan ataupun suatu program, karena dengan adanya sebuah sosialisasi suatu kegiatan ataupun suatu program dapat berjalan secara seimbang baik dengan adanya dukungan dari pihak dalam maupun pihak luar. Sosialisasi juga merupakan salah satu cara dimana suatu individual ataupun organisasi maupun kelompok dapat mencapai sebuah tujuan dan visi misi

dari sebuah program ataupun kegiatan yang direncanakan dan dijalankan. Selain pentingnya sosialisasi dalam sebuah kegiatan, koordinasi ataupun komunikasi pun sangat diperlukan mengingat suatu kegiatan pada dasarnya perlu adanya suatu komunikasi timbal balik yang nantinya akan menghasilkan sebuah hasil yang dapat mencapai tujuan.

Selanjutnya peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap terkait Program Indonesia Pintar yaitu mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh satuan pendidikan formal, satuan pendidikan nonformal, dan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Kemudian mengkoordinasikan dengan lembaga penyalur untuk penjadwalan pencairan atau pengambilan dana PIP oleh peserta didik penerima. Sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Cilacap menjadi salah satu hal terpenting dalam peran dan pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini, peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap sangat menjadi titik utama dalam penyampaian dan pelaksanaan program. Oleh karena itu dalam menjalankan perannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap selalu bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyaluran Program Indonesia Pintar. Ibu Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Sosialisasi itu memang sangat penting mas apalagi sebagian masyarakat masih ada yang belum tau apa itu KIP. Kalau sosialisasi biasanya kami selalu adakan per semesternya mas atau enam bulan sekali apalagi menjelang kenaikan kelas atau pergantian kelas kan terkadang terjadi perbedaan data itu pasti ada mas, missal ada yang naik kejenjang selanjutnya atau ada yang keluarga menjadi mampu, atau ada yang meninggal dunia dan banyak lagi mas. Jadi biasanya

dalam hal sosialisasi kami undang seluruh kepala sekolah dari semua jenjang pendidikan formal maupun non formal, kami siapkan ruangan lalu nantinya diberikan undangan untuk setiap kepala sekolahnya atau perwakilan. Nah disitu kami sosialisasikan apa saja sih syarat-syarat atau ketentuan yang menjadi hak untuk menerima KIP. Lalu setelah itu nantinya setiap sekolah kan pasti setiap ada pembagian rapor siswa itu memberitahu pihak kami, memang kan tidak semua sekolah yang bias kami kunjungi kami pun terbatas, tetapi dalam setiap sosialisasi tersebut ada dari pihak kami pun ikut serta jadi kaya gabung gitu mas, dan kalau pun tidak kami datangi pihak sekolah setiap penerimaan akan memberikan informasi juga terkait ada atau tidaknya data-data baru bagi penerima bantuan PIP, jadi kami selalu terjalin koordinasi baik dari pihak kami maupun sekolah yang nantinya hasilnya sama atau tidaknya akan diajukan kembali dari kami Dinas ke dapodik untuk dapodik melakukan verifikasi kembali.”

Kutipan Ibu Dwi Yulianti menegaskan bahwa sosialisasi dan koordinasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar terkait data calon penerima KIP yang nantinya akan di verifikasi. Ibu Dwi Yulianti pun menegaskan bahwasanya selalu adanya sosialisasi dan koordinasi yang diterapkan baik antara Dinas dengan sekolah, sekolah dengan wali murid ataupun wali murid dengan Dinas, sehingga terciptanya koordinasi dan komunikasi dua arah yang nantinya menghasilkan sebuah *report* atau laporan berupa data pembaharuan yang nantinya data tersebut akan disetujui oleh pihak Dinas dan kemudian kembali dikirimkan kepada Dapodik untuk di verifikasi.

Tabel 5.2
Daftar Peserta Sosialisasi Program Indonesia Pintar di Kecamatan Cilacap Selatan

NO	Nama Sekolah	Nama Kepala Sekolah/Mewakili
1	SD NEGERI CILACAP 01 CILACAP SELATAN	Siti Masitoh
2	SD NEGERI CILACAP 02 CILACAP SELATAN	Supini

3	SD NEGERI CILACAP 03 CILACAP SELATAN	Sri Setyowati
4	SD NEGERI CILACAP 05 CILACAP SELATAN	Susiswati
5	SD NEGERI CILACAP 07 CILACAP SELATAN	Binar Chusnul Fatimah
6	SD NEGERI CILACAP 08 CILACAP SELATAN	Sri Setyowati
7	SD NEGERI CILACAP 09 CILACAP SELATAN	Sri Hartati
8	SD NEGERI CILACAP 10 CILACAP SELATAN	Trisni Purwaningsih
9	SD NEGERI SIDAKAYA 01 CILACAP SELATAN	Endang Subekti
10	SD NEGERI SIDAKAYA 02 CILACAP SELATAN	Any Safira
11	SD NEGERI SIDAKAYA 03 CILACAP SELATAN	Sri Wahyuni
12	SD NEGERI SIDAKAYA 04 CILACAP SELATAN	Sri Wahyuni
13	SD NEGERI SIDAKAYA 05 CILACAP SELATAN	Yamtini
14	SD NEGERI SIDAKAYA 06 CILACAP SELATAN	Partiwi
15	SD NEGERI SIDAKAYA 07 CILACAP SELATAN	Sri Sadaruni
16	SD NEGERI SIDAKAYA 09 CILACAP SELATAN	Aziati Susantiana
17	SD NEGERI SIDAKAYA 10 CILACAP SELATAN	Sumirah
18	SD NEGERI SIDAKAYA 13 CILACAP SELATAN	Suwarni
19	SD NEGERI TAMBAKREJA 01 CILACAP SELATAN	Amongkasih Triharyanti
20	SD NEGERI TAMBAKREJA 02 CILACAP SELATAN	Soeminah
21	SD NEGERI TAMBAKREJA 04 CILACAP SELATAN	Yunanik
22	SD NEGERI TAMBAKREJA 05 CILACAP SELATAN	Heru Suprapti
23	SD NEGERI TAMBAKREJA 06 CILACAP SELATAN	Budiningsih

24	SD NEGERI TAMBAKREJA 07 CILACAP SELATAN	Widodo
25	SD NEGERI TAMBAKREJA 08 CILACAP SELATAN	Sulistiyani
26	SD NEGERI TAMBAKREJA 09 CILACAP SELATAN	Eny Indriyati
27	SD NEGERI TAMBAKREJA 10 CILACAP SELATAN	Sri Susilowati
28	SD NEGERI TAMBAKREJA 11 CILACAP SELATAN	Siti Mutmainah
29	SD NEGERI TEGALKAMULYAN 01 CILACAP SELATAN	Sitta Diana Eddy Setyaningsih
30	SD NEGERI TEGALKAMULYAN 02 CILACAP SELATAN	Cayitno
31	SD NEGERI TEGALKAMULYAN 03 CILACAP SELATAN	Rudiyati
32	SD NEGERI TEGALKAMULYAN 04 CILACAP SELATAN	Bening Siwi Prabaningsih
33	SD NEGERI TEGALREJA 01 CILACAP SELATAN	Supriyatin
34	SD NEGERI TEGALREJA 02 CILACAP SELATAN	Bartinah
35	SD NEGERI TEGALREJA 04 CILACAP SELATAN	Eli Prasetyo Budi
36	SD PIUS CILACAP	Sr.m. Ursula Endang Ratmawati Parhusip, pbhk

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap)

Selain data kepala sekolah atau wakil yang mewakili undangan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, berikut adalah beberapa pengambilan gambar saat diadakan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dengan Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah:

Gambar 5.1
Suasana Sosialisasi Antara Pihak Dinas Pendidikan dengan Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah Pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2017



Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar Tahun 2017

Gambar 5.2
Suasana Sosialisasi Antara Pihak Dinas Pendidikan dengan Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah Pada Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2017



Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar

Gambar 5.3
Suasana Sosialisasi Antara Pihak Sekolah dengan Wali Murid Saat Pembagian Rapor Siswa Di Salah satu Sekolah Di Kabupaten Cilacap Tahun 2017



Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar Tahun 2017

Selain bertugas mensosialisasikan kepada pihak-pihak tertentu terkait Program Indonesia Pintar, peran Dinas selanjutnya adalah mengkoordinasikan dengan lembaga penyalur untuk penjadwalan pencairan atau pengambilan dana PIP oleh peserta didik penerima. Ibu Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Untuk lembaga penyalur kami disini bekerjasama dengan salah satu Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Jadi sistem penyalurannya kami bekerjasama dengan pihak BRI untuk melakukan penjadwalan pencairan yang biasanya pencairan akan dilakukan setiap satu kali dalam setahun atau dilakukan dalam dua kali dalam setahun (per-semester) biasanya diberikan ketika kenaikan kelas atau pergantian kelas mas ada juga yang per semester. Jadi sistemnya ada beberapa pihak bank datang langsung ke sekolah untuk mencairkan dana da nada pula wali murid yang datang langsung ke bank terkait pencairan. Biasanya sih kalau yang ke sekolah itu yang tempatnya kurang memadai mas, misalnya nih kan

unit sempit tidak seperti kantor cabang utama yang tempatnya agak memadai. Lalu kadang ada orangtua siswa yang sudah biasa melakukan pencairan melalui atm masing-masing mas, karena memang kan diberikan atm dan buku tabungan tersendiri untuk penyaluran dana ajdi mereka hanya tanda tangan saja mas, selanjutnya untuk penyaluran dana akan masuk langsung ke nomor rekening masing-masing, dan sebelum pencairan terlebih dahulu kami memberikan daftar nama siswa yang berhak menerima PIP melalui SK yang sudah turun langsung dari Dapodik.”

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa penyaluran atau pencairan dana PIP dilakukan oleh pihak ke tiga yaitu bekerjasama dengan lembaga keuangan atau tepatnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), setelah Dinas Pendidikan mendapatkan SK dari Dapodik maka selanjutnya Dinas memberikan nama-nama terkait siapa saja yang berhak menerima dana tersebut kepada pihak Bank yang nantinya Bank tersebut akan membuatkan rekening beserta ATM yang akan diberikan langsung oleh penerima dana PIP yang sudah dijadwalkan setiap satu tahun sekali di setiap kenaikan kelas atau pergantian kelas ataupun dalam setahun dua kali dalam per semester, dan dananya akan langsung masuk pada rekening masing-masing yang sebelum pencairannya penerima dana harus melakukan pencairan berupa tanda tangan pengambilan pencairan.

Dengan demikian peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan PIP di Kabupaten Cilacap baik dengan setiap instansi atau lembaga sekolah maupun dengan pihak atau lembaga penyalur dana sudah berjalan cukup baik dan sudah terjalinnya komunikasi dua arah atau koordinasi yang baik yang menghasilkan terkumpulnya

data calon penerima PIP dan hasil dari Surat Keputusan yang berasal dari Dapodik telah tersampaikan baik dengan pihak sekolah, wali murid, maupun pihak bank sebagai lembaga penyalur dana.

5.4 Menghimpun dan Melayani Pengaduan Masyarakat Di Kabupaten Cilacap

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar selanjutnya adalah menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat, yang mana dalam peran ini terdapat pilar bahwa Dinas perlu menetapkan petugas atau tim data PIP, menyetujui usulan siswa calon penerima dari sekolah dan satuan pendidikan nonformal setelah data terverifikasi dan kemudian menangani pengaduan masyarakat terkait PIP. Ibu Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Untuk petugas atau tim PIP secara khusus kami hanya menyusun nama-nama intinya saja mas, seperti ketuanya saja. Namun untuk penanganan petugas-petugas yang mencatat itu kan sekolah masing-masing sehingga dalam struktur kami ya kepala sekolah itu mas, jika dari pihak kami ya paling seksi-seksinya saja mas seperti saya. Disini saya yang khusus menangani PIP mas kalau yang lain ada lagi tugasnya masing-masing. Nah darisinihlah kamipun masih terbatas dalam ketenagakerjaan mas, karena kan ya gak mungkin saya sebagai seksi PIP mengecek satu-satu dari setiap sekolah, jika sosialisipun saya dibantu dengan tim-tim lainnya mas yang sudah ditunjuk oleh Kepala kami mas seperti itu.”

Analisis penulis setelah mengetahui keterangan Ibu Dwi Yulianti tersebut bahwa memiliki kendala dalam hal minimnya sumber daya manusia, sehingga dalam prosesnya terutama dalam hal pemantauan ataupun sosialisasi masih memiliki keterbatasan. Masyarakat yang merasa ada masalah terkait program Indonesia pintar melakukan pengaduan langsung kepada pihak sekolah terkait ataupun datang

langsung ke dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan penjelasan terkait permasalahannya. Adapun susunan secara garis besar petugas PIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017 sebagai berikut:

- 1) Kepala Pelaksanaan PIP : Warsono, S.H.,M.Hum.
- 2) Sekertaris : Wuyung Sulistiyo Pambudi S.Pd.,M.Pd.
- 3) Kabid Pendidikan Formal : Drs. Nunung Sugiono, M.Pd.
- 4) Kabid Pendidikan Non Formal : Sukarno Sugiharto, M.M.
- 5) Seksi PIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Dwi Yulianti.
- 6) Pihak Sekolah.

Selanjutnya Ibu Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Nah untuk pengaduan sejauh ini sih biasanya masyarakat datang ke Dinas mas biasanya tidak ada perantara mas dan tidak melalui apapun, mereka terkadang menanyakan langsung kenapa kok saya tidak dapat lalu teman anak saya dapat, sejauh itu banyaknya pengaduan kepada kami mas. Tetapi untuk penyaluran dana atau yang lainnya sih biasanya banyaknya langsung ke banknya mas atau paling tidak biasanya ke sekolah masing-masing. Kadang mungkin mereka tidak puas dengan jawaban dari pihak sekolah ada yang datang langsung kesini karena ingin minta dibuatkan KIP, tetapi disini kami pun memberitahu kembali bahwa pembuatan KIP itu bukan oleh pihak kami Dinas melainkan pusat atau Dapodik, jika ingin mendapatkan bisa mendaftar kepada sekolah masing-masing yang nantinya sekolah akan memberikan data kepada kami dan kami nakan menerima data yang nantinya kami kirim melalui online kepada Dapodik. Itupun pihak sekolah perlu menyeleksi kembali, setelah itu baru mereka mengerti mas.”

Setelah mendapatkan penjelasan dan keterangan oleh pihak Dinas kemudian pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam menghimpun dan menangani pengaduan khususnya dalam pelaksanaan PIP dengan cara menyusun tim

pelaksanaan PIP khusus Kabupaten Cilacap, menerima data calon penerima PIP yang diusulkan setiap sekolah yang kemudian dikirimkan kepada Dapodik, dan menangani pengaduan masyarakat secara langsung, yang mana sejauh ini pengaduan berupa pengajuan permintaan KIP. Dengan demikian peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam peran menghimpun dan melayani pengaduan khususnya dalam Program Indonesia Pintar sudah cukup baik, karena selain peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap menanggapi secara cepat dan tepat, pihak Dinas pun mendapat bantuan dari pihak sekolah yang mana apabila atau sebelum masyarakat melakukan pengaduan kepada pihak Dinas, pihak sekolah menjadi jembatan komunikasi pertama yang membantu menjelaskan terlebih dahulu, sehingga ketika terdapat beberapa masyarakat yang masih belum cukup puas dengan jawaban pihak sekolah, maka pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan membantu menjelaskan.

5.5 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi PIP Di Kabupaten Cilacap

Peran pemerintah daerah yang terakhir khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan PIP yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi Implementasi terhadap pelaksanaan PIP. Pemantauan dan Evaluasi sangat diperlukan mengingat tanpa adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala, suatu program atau kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Pemantauan pada dasarnya sama halnya dengan melihat hasil dari suatu rangkaian atau kegiatan yang

sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pemantauan bertujuan untuk menghasilkan *output* yang nantinya akan di evaluasi agar lebih baik. Pemantauan tidak dapat terlepas suatu kegiatan yang bernama evaluasi, yang mana hasil dari pemantauan lah yang akan di evaluasikan untuk mendapatkan hasil akhir sesuai dengan tujuan pelaksanaan.

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan PIP pada dasarnya berperan untuk memantau sejauh mana hasil dari pelaksanaan PIP di Kabupaten Cilacap. Hasil yang menegaskan bahwa tujuan akan PIP terlaksanakan sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku yang mana seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap yang berhak dan pantas sesuai dengan kriteria berhak mendapatkan dana penyaluran PIP. Kemudian peran yang paling utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang menjadi tugas dalam pemantauan dan evaluasi pada kegiatan PIP ini yaitu memantau dan mengevaluasi penyalran atau pencairan dana PIP kepada masyarakat yang menjadi tujuan utama dari keberlangsungannya PIP di Kabupaten Cilacap. Ibu Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Peran kami dalam pemantauan atau evaluasi jadi kami memonitoring atau memantau itu setiap tiga bulan sekali mas, kami memantau setaip data sekolah apakah sudah data terbaru atau data lama, mengingat kan data harus terbaru setiap semesternya mas, dan untuk pencairan atau penyaluran karena staf kami terbatas tidak dapat melihat secara langsung maka setiap setelah penyaluran biasanya pihak bank akan memberitahu mas jadi sudah ada datanya nanti, dan tidak hanya dari staf bank saja, sekolah pun juga setelah adanya penyaluran atau pencairan dana biasanya sekolah yang belum terpenuhi seluruh siswa nya dalam pencairan akan langsung menghubungi kami dan kemudian nantinya kami mengkonfirmasi oleh pihak bank. Dan untuk evaluasi kami adakan setiap setelah

penerimaan dana PIP mas, biasanya setelah dana tersalurkan kana da data nah lalu kami evaluasi apakah seluruh sekolah sudah menerima atau belum, dan evaluasi yang lain pula biasanya karena ada pengaduan seperti orangtua wali murid dating ke sini mas biasanya banyak kejadian setelah melakukan pencairan. Jadi seluruh data dan pengaduan kami tamping lalu kami adakan rapat untuk mengevaluasi seperti itu mas.”

Paparan di atas menegaskan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan PIP khususnya dalam peran pemantauan dan evaluasi diadakan setiap tiga bulannya untuk pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap semester atau dua kali dalam setahun yang nantinya akan kembali di rapatkan dengan peran-peran yang berkepentingan dalam hal tersebut. Berikut gambar hasil pemantauan dari pihak Dinas Pendidikan saat penyaluran atau pencairan dana PIP berlangsung:

Gambar 5.4
Suasana Pencairan Dana PIP dari Lembaga Keuangan dengan Salah Satu Wali Murid Tahun 2017



Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar

Gambar 5.5

Suasana Pencairan Dana PIP Tahun 2017



Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar

Gambar 5.6 Suasana Pencairan PIPTahun 2017



Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar

Setelah melakukan monitoring atau pemantauan terhadap pelaksanaan PIP khususnya dalam penyaluran atau pencairan dana, peran Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Cilacap selanjutnya adalah evaluasi implementasi program. Evaluasi implementasi program bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah kegiatan atau program sudah berjalan secara efektif atau belum dan untuk mengetahui apakah sebuah kegiatan tersebut sudah berhasil sesuai dengan tujuan ataukah sebaliknya. Ibu

Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Untuk evaluasi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya mas, jadi kami melakukan evaluasi setiap dana pencairan itu dilakukan atau satu tahun dua kali, dan untuk evaluasi akhir tahun atau akhir ajaran untuk pergantian kami pun mengecek apakah data sudah tersalurkan ataukah belu, jika belum maka akan ada daftar nama-nama siswa yang belum dapat melakukan pencairan dana PIP dan hasil akhir di akhir tahun biasanya kami membandingkan tingkat kenaikan penerima PIP apakah meningkat atau menurun ataukah mengurangi angka putus sekolah ataupun sebaliknya. Jika angka itu meningkat artinya bahwa program ini atau PIP ini sudah berhasil mas untuk membantu menuntaskan angka putus sekolah khususnya di Kabupaten Cilacap mas, tetapi apabila sebaliknya nah kita perlu cari tahu dimana letak ketidakmaksimalan atau ketidaksesuaian keberlangsungan program ini. Tetapi sejauh ini dari hasil evaluasi setiap tahunnya, implementasi atau pelaksanaan penyaluran dana.”

Pernyataan di atas menegaskan bahwa kegiatan evaluasi implementasi PIP dilakukan setiap setelah pencairan atau penyaluran dana PIP dengan melihat laporan atau data kepenyaluran yang diberikan oleh lembaga penyalur ataupun pihak sekolah, nantinya dalam data tersebut Dinas akan mengetahui nama-nama siswa yang sudah melakukan pencairan dana dan siswa yang belum melakukan pencairan dana. Selain itu evaluasi dilakukan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dapat mengetahui perkembangan adanya PIP dari setiap tahunnya.

Dana PIP sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat yang memang berhak dan pantas menerimanya, sedangkan masih ada beberapa masyarakat yang belum menerima dengan berbagai penyebab. Ibu Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Dari hasil laporan mana yang sudah menerima dan mana yang belum menerima lalu dari pihak kami mengevaluasi apa penyebabnya belum tersalurkan dana bantuan itu mas, dan sejauh ini penyebab dana yang belum cair biasanya ketidaktahuan wali murid dalam melakukan pencairan mas, jadi ketika melakukan pencairan masih ada beberapa orangtua yang tidak menghiraukan aturan pencairan pengambilan dana. Seperti contohnya tidak membawa atm atau buku rekening tujuan, atau tanda tangan yang berbeda, dan ada pula yang mengambil itu tidak sesuai dengan yang di daftarkan sehingga menyebabkan kendala pencairan. Namun pada dasarnya pencairan itu sudah dimasukkan oleh lembaga keuangan tersebut ke rekening atau tabungan masing-masing mas. Setelah data semua terkumpul kemudian kami mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PIP secara keseluruhan mas, apakah mengalami kemajuan ataupun sebaliknya, apakah tingkat siswa sekolah makin meningkat ataupun sebaliknya mas. Biasanya kami lakukan itu setiap akhir tahunnya mas menjelang pergantian tahun dan pergantian data mas.”

Pernyataan Ibu Dwi Yulianti menegaskan bahwa penyebab utama belum tersalurkannya pencairan dana PIP berasal dari wali murid atau orang tua siswa yang masih belum jelas dan paham akan himbuan atau tata cara pengambilan pencairan dana PIP. Kemudian untuk hasil evaluasi implementasi PIP di Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Ibu Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Nah kalau untuk evaluasi kami mas, implementasi atau pelaksanaan PIP memang sudah tersalurkan secara keseluruhan apabila dilihat dari data yang diberikan sekolah kepada kami lalu data yang diberikan oleh Dapodik melalui SK itu sudah sesuai dengan seluruh kaidah atau prosedur pelaksanaan PIP mas dan tetap kembali lagi kami sebagai peran pemerintah kota atau Kabupaten Cilacap dan pemerintah pusat hanya dapat meminimalisir setidaknya ya mas dengan adanya PIP ini diharapkan mengurangi angka putus sekolah, tetapi jika belum terealisasi mungkin masih banyak faktor-faktor lain nya diluar kewenangan kami

mas, namun apabila angka putus sekolah memang mengalami penurunan mas antara tahun 2016-2017. Karena pada dasarnya dana PIP ini kan diberikan kepada wali murid ya mas ya, tentu saja yang mengelola dana tersebut tergantung wali murid masing-masing, karena pada dasarnya PIP hanya menegaskan dana tersebut sebagai dana bantuan untuk siswa tidak mengatur dana tersebut untuk apa sesuai undang-undang itu tidak mas. Jadi kembali lagi kepada setiap kepala keluarga atau wali murid yang menggunakan dan tersebut dengan bijak mas.”

Berikut data tabel hasil evaluasi Dinas Pendidikan dan Kabupaten Cilacap dalam angka putus sekolah di Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

Tabel 5.3
Perbandingan Capaian Angka Putus Sekolah Di Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2017

No.	Indikator	Tahun (%)		
		2015	2016	2017
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,08	0,01	0,07
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,3	0,05	0,44
3.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	97,3	94,09	93,12
4.	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	71,82	75,86	72,02

Sumber: Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017

Selanjutnya berikut data tabel hasil evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kabupaten Cilacap per kecamatan se-Kabupaten Cilacap pada Tahun 2017:

Tabel 5.4
Capaian Hasil Pelaksanaan Program Indonesia Pintar se-Kecamatan
Kabupaten Cilacap Tahun 2017

No	Kecamatan	%
1	Adipala	98,75%
2	Bantasari	99,19%
3	Binangun	97,85%
4	Cilacap Selatan	93,99%
5	Cilacap Tengah	95,35%
6	Cilacap Utara	91,61%
7	Cimanggung	99,68%
8	Cipari	99,65%
9	Dayeuhluhur	99,61%
10	Gandrungmangu	97,77%
11	Jeruk Legi	98,23%
12	Kampung Laut	98,22%
13	Karang Pucung	99,59%
14	Kawunganten	93,94%
15	Kedungreja	96,32%
16	Kesugihan	98,83%
17	Kroya	93,26%
18	Majenang	97,89%
19	Maos	96,4%
20	Nusawungu	96,73%

21	Patimuan	98,47%
22	Sampang	98,96%
23	Sidareja	94,66%
24	Wanareja	99,78%
Total		96,64%

Sumber: Kemendikbud Kabupaten Cilacap Tahun 2017

Jika melihat data kedua tabel di atas, jelas bahwa angka putus sekolah pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka putus sekolah pada tahun sebelumnya, sedangkan untuk pelaksanaan penyaluran dana PIP per kecamatan Kabupaten Cilacap sudah menginjak rata-rata 96,64%, hal ini menyatakan bahwa penyaluran dana PIP di Kabupaten Cilacap dapat dikatakan sudah cukup baik.

Dengan demikian peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam peran pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran dana PIP di Kabupaten Cilacap sudah cukup baik, sedangkan hasil pemantauan dan evaluasi peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017 dalam pelaksanaan PIP juga dapat dikatakan cukup baik, hanya saja pemerintah perlu lebih meningkatkan pelaksanaan PIP dalam hal ketentuan penggunaan dana PIP agar dana yang tersalurkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atau dalam hal khusus hanya digunakan untuk keperluan dan biaya sekolah. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan faktor pendidikan demi kemajuan bangsa dan Negara. Adanya program pemerintah berupa PIP belum sepenuhnya menjadi faktor penentu dalam mengurangi angka putus sekolah. Faktor-faktor lain

diluar kewenangan pemerintah tentu menjadi hambatan tersendiri bagi setiap masyarakat. Dalam hal ini pula pihak Dinas masih menjadi fokus utama khususnya menurunkan angka putus sekolah di Kabupaten Cilacap.

5.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar Tahun 2017

Setelah sebelumnya membahas mengenai peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, selanjutnya penulis akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan PIP Tahun 2017. Setiap pelaksanaan tentu memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi setiap kegiatan suatu program, baik itu faktir pendukung maupun faktor penghambat. Faktor-faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini yang berkaitan dengan peran Dinas yaitu berupa faktor ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.

5.6.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana menurut Dinas Pendidikan menjadi faktor pendukung dalam berjalannya pelaksanaan PIP. Ibu Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Bagi kami sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung mas dalam pelaksanaan PIP, jika tidak ada sarana dan prasaran lalu bagaimana penyaluran program ini kan mas. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam hal ini saya

contohkan seperti adanya ruangan untuk berkumpul dan bersosialisasi. Ketika kami mengundang kepala sekolah untuk datang tentunya kami sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk bersosialisasi kepada mereka. Selain itu sarana prasarana yang diberikan oleh masing-masing sekolah kepada wali murid mas, terkadang kan pihak kami pun ada yang ikut sosialisasi istilahnya ikut nimbrung gitu mas, tentunya sekolah pun mendukung dan ikut serta dalam menyiapkan sarana dan prasarana mas. Sejauh ini paling yang sedikit banyak kritikan itu ketika penyaluran mas, kan siswa banyak tuh sedangkan penyaluran kadang mereka semua datang berbondong-bondong ke bank, dan tau sendiri kan tidak semua bank itu memiliki tempat yang memadai akibatnya kan sesak kalau tempat penyaluran tidak cukup, tapi ya mau gimana lagi kan mas hanya itu sih paling kendalanya, selebihnya untuk sarana prasarana dalam pelaksanaan PIP tidak ada kendala mas.”

Paparan Ibu Dwi Yulianti di atas menegaskan bahwa sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan PIP di Kabupaten Cilacap, dan sejauh ini tidak ada memiliki kendala yang signifikan hanya kritik dalam suasana pencairan dana PIP yaitu minimnya tempat pengambilan di lembaga keuangan unit tertentu di Kabupaten Cilacap.

Gambar 5.7
Sarana dan Prasarana yang Disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap untuk Sosialisasi Seputar PIP Kepada Setiap Kepala Sekolah di Kabupaten Cilacap Tahun 2017



Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar

Gambar 5.8
Sarana dan Prasarana Berasal Dari Lembaga Penyalur Dana



Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan penyaluran Program Indonesia Pintar di Kabupaten Cilacap Tahun 2017 terutama sebagai faktor pendukung peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam peran melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP mengingat sarana prasarana yang sudah disediakan cukup membantu karena masih minimnya anggaran. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor pendukung dalam peran pengusulan peserta didik calon penerima PIP, tanpa adanya sarana dan prasarana yang kurang tentunya akan menghambat dalam proses pengusulan calon peserta didik yang akan diusulkan kepada pihak pusat atau Dapodik.

5.6.2 Ketersediaan Anggaran

Jika berbicara mengenai anggaran dalam suatu kebijakan, tentunya menjadi salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan setiap kebijakan. Tanpa adanya anggaran

yang cukup maka suatu kebijakan atau program dan kegiatan di dalamnya tidak akan berjalan dengan maksimal. Anggaran yang cukup dan memadai menjadi salah satu yang nantinya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan, karena ketidaksiadaannya anggaran nantinya dapat menghambat berjalannya suatu kebijakan maupun program pelaksanaan suatu kebijakan. Ibu Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Kalau ngomong anggaran sebenarnya anggaran untuk PIP ini belum maksimal mas, ya memang seluruh dana PIP itu sebagian besar memang sudah cair atau sudah tersalurkan kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerimanya, hanya saja memang pemerintah tidak mengkhususkan adanya anggaran untuk sosialisasi, baik untuk sosialisasi kami kepada setiap sekolah maupun sekolah kepada wali murid. Kalau kepada wali murid mungkin tanpa adanya anggaran pun bisa ya mas kan tentunya bisa langsung menghimbau saat pembelajaran kepada siswa ataupun saat penerimaan rapor ya mas, tetapi kalau dari pihak dinas kan mengumpulkan setiap kepala sekolah atau wali sekolah itu kan terkadang butuh anggaran sosialisasi ataupun antara pihak kami untuk datang langsung kepada masyarakat dan menghimbau secara langsung gitu kan tentunya butuh anggaran walau hanya sedikit ya mas. Nah memang anggaran ini menjadi salah satu faktor penghambat mengingat di dalam surat keputusan pun memang tidak ada rincian anggaran, di dalam surat keputusan hanya ada daftar total anggaran dana PIP di setiap daerah mas. Jadi anggaran yang tidak maksimal sedikit menghambat himbauan mengenai PIP terutama dalam hal sosialisasi mas.”

Analisis penulis dari penjelasan Ibu Dwi Yulianti di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Cilacap menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program terutama sebagai penghambat dalam peran sosialisasi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik terhadap pihak setiap instansi sekolah dan terutama kepada masyarakat. Mengingat

bahwa di dalam surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud, tidak ada anggaran secara khusus untuk anggaran sosialisasi, yang ada hanya anggaran dana penyaluran PIP di setiap daerah.

5.6.3 Kemitraan

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kemitraan dalam pelaksanaan PIP merupakan salah satu faktor pendukung yang mana tanpa adanya kemitraan penyaluran dana atau pencairan dana PIP tidak akan berjalan secara maksimal. Dalam hal ini kemitraan yang bekerjasama dengan Dinas yaitu pihak Bank Rakyat Indonsia yang pada dasarnya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat sebagai lembaga keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan dana kepada calon penerima PIP dan pihak sekolah merupakan salah satu kemitraan yang turut serta dalam mengusulkan peserta didik dan melayani pengaduaan dari masyarakat serta melakukan sosialisasi disekolahnya yang diikuti oleh orang tua murid. Ibu Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Untuk kemitraan itu sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan PIP mas, dan lembaga yang ditunjuk pun sudah ditentukan dari pusat yaitu BRI mas. Jadi nanti kami menyerahkan daftar nama-nama calon penerima PIP mas pada pihak bank yang kemudian pihak bank membuatkan rekening dan atm mas. Kemudian setelah itu pihak bank memberikan tabungannya kepada siswa mas atau orangtua atau wali siswa penerima PIP itu di sekolah masing-masing yang sudah mencalonkan pesertadidiknya dan sudah terdaftar di dapodik. Tetapi tetap untuk melakukan pencairan harus ke bank dulu mas, tetapi ada yang gaperlu ke bank karena pihak banknya ke sekolah. Nah kalau soal itu kembali lagi pada keputusan kepala bank masing-masing ya mas. Kalau ada pengaduaan oleh masyarakat biasanya dibantu oleh pihak sekolah juga karna banyak orang tua yang mengadukan permasalahan terkait PIP kesekolah dulu baru datang langsung ke kantor Dinas sini mas. Pihak

sekolah juga melakukan sosialisasi mas terkait PIP dilakukan disekolahnya masing-masing”

. Berikut gambar siswa penerima PIP yang mendapat rekening dari Bank Rakyat

Indonesia:

Gambar 5.9
Pembagian Rekening Keapada Siswa Penerima PIP



Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar

Gambar 5.10

Pembagian Rekening Keapada Orang Tua Siswa Penerima PIP



Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemitraan menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar khususnya di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 dalam peran Dinas dalam hal pemantauan dan evaluasi serta mengusulkan peserta didik, melayani pengaduan dari masyarakat, pemantauan pencairan dana, dan melakukan sosialisasi. Tanpa adanya kemitraan yang telah terjalin komunikasi yang baik, baik antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dengan pihak sekolah dan pihak bank, baik antara pihak bank dengan dan pihak sekolah maupun pihak wali murid atau siswa penerima PIP di Kabupaten Cilacap Tahun 2017 maka peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

dalam hal mengusulkan peserta didik ,melayani pengaduaan masyarakat maupun pemantauan dan evaluasi, melakukan sosialisasi tidak akan berjalan dengan baik.

5.6.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu program pemerintah yang bertujuan untuk masyarakat yang mana tanpa adanya partisipasi atau dukungan dalam masyarakat, suatu program atau kegiatan tidak akan tersalurkan atau tidak akan berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat juga menjadi jawaban dalam setiap kebijakan, karena kebijakan dibuat tentunya akan bertujuan untuk masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat akan menjadi salah satu jawaban apakah suatu kebijakan tersampaikan dan tersalurkan kepada masyarakat atau sebaliknya. Ibu Dwi Yulianti mengatakan bahwa:

“Kalau membahas partisipasi masyarakat itu sebetulnya jelas faktor pendukungmas. Hanya saja terkadang memang ada beberapa masyarakat yang masih belum mengetahui informasi-informasi penting terkait PIP ini mas, tetapi sejauh ini masyarakat Kabupaten Cilacap sangat baik, aktif, dan berpartisipasi dalam PIP ini. Walau ada beberapa masyarakat yang datang kesini sekedar mengadu mengapa anaknya tidak mendapat KIP ini menjadi salah satu yang menarik artinya mas, selain itu juga kan ketika peran sekolah bersosialisasi kepada wali murid itu banyak yang bertanya dan kemudian mendaftar ke sekolah masing-masing yang nantinya akan diolah data oleh sekolah dan kemudian disampaikan kepada pihak kami, jadi memang di kalangan masyarakat KIP dan PIP sudah sering terdengar, hanya pemahaman saja yang masih kurang. Karena tanpa adanya partisipasi masyarakat ini pula nantinya untuk mencairkan dana itu susah ya mas, kan anak sekolah itu banyak yang umurnya di bawah tujuh belas tahun sehingga masih perlu pendampingan ketika akan mencairkan dana mas, jadi sejauh ini partisipasi masyarakat di Kabupaten Cilacap sudah cukup baik dalam Program Indonesia Pintar mas.”

Analisis penulis dari hasil penjelasan Ibu Dwi Yulianti di atas bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Cilacap dalam kegiatan PIP ini sudah cukup baik, melihat dari segi pengaduan masyarakat yang secara langsung datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap untuk menanyakan mengenai PIP, partisipasi masyarakat mendaftarkan dirinya kepada sekolah, serta mengikuti sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Cilacap dan partisipasi masyarakat saat dana penyaluran PIP berlangsung.

Gambar 5.11
Partisipasi Masyarakat Ketika Pencairan Dana PIP Di Kabupaten Cilacap
Tahun 2017



Sumber: Laporan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar

Selain penjelasan langsung yang diberikan oleh pihak Dinas, penulis juga melakukan penelitian dengan menanyakan secara langsung kepada beberapa masyarakat Cilacap untuk mengetahui sejauh mana mereka mengenal dan mengetahui Program Indonesia Pintar khususnya di Kabupaten Cilacap tahun 2017. Berikut penjelasan dari Bapak Wahono sebagai penerima PIP di Kabupaten Cilacap Tahun 2017:

“Wah saya sudah mengenal PIP sejak beberapa tahun lalu mas, kalau tidak salah sejak tahun 2015 apaya mas saya agak lupa, soalnya waktu itu yang mengurus istri saya mas, memang dulu saat anak saya duduk dibangku SMP kalau tidak salah, saat pengambilan rapor itu ada semacam sosialisasi untuk memberitahukan ada yang belum memiliki KIP atau belum dan lalu di data mas atau pas awal masuk SMP ya mas saya agak lupa soalnya sudah lama. Nah dari situ istri saya bilang kepada saya kalau sudah mendaftarkan anak kami untuk mendapatkan KIP, kalau tidak salah dulu istri saya mendaftar dengan menggunakan kartu program keluarga harapan mas. Lalu ada pemberitahuan kepada kami bahwa kami disuruh datang ke bank untuk proses penerimaan rekening. Setau saya sih KIP itu untuk warga yang kurang mampu ya mas seperti saya hehehe...ya mungkin itu saja mas yang saya tahu.”

Selanjutnya penulis kembali melakukan penelitian kepada salah satu wali murid penerima PIP berikutnya. Berikut pemaparan Ibu Nur:

“Saya mendapatkan KIP sejak anak saya kelas satu SD mas, kalau sekarang itu anak saya sudah kelas empat mas, waktu 2017 artinya anak saya kelas 3 mas. Sebelum saya mendapatkan KIP itu orangtua wali murid saat pendaftaran ditanya apakah memiliki KIS yaitu Kartu Indonesia Sejahtera atau Kartu Keluarga Harapan, nah saya memang ada mas kartu KIS itu lalu saya tunjukan lalu pihaksekolah bilang kalau anak saya di daftarkan untuk mendapatkan KIP, dan saya bertanya KIP itu apa, sekolah Cuma bilang kalau KIP ini dana bantuan program pemerintah khusus masyarakat pemegang KIS atau kartu PKH itu mas, wah ya saya kebetulan mas karena kan biaya sekolah itu mahal kan mas, Alhamdulillah masih dapat bantuan lagi untuk anak sekolah mas.”

Pemaparan selanjutnya penulis meneliti secara langsung dengan dua murid Sekolah Menengah Atas mengenai Program Indonesia Pintar, yaitu bernama Wiwin Kurnianingsih siswa penerima KIP dan Desi Fitriani siswa yang tidak memiliki KIP. Menurut penjelasan Wiwin Kurnianingsih :

“Saya menerima KIP sudah dari SMP mas, saat saya kelas 7, saat itu sekolah meminta data keluarga mas, kalau ga salah kartu keluarga diminta dan diberi pengumuman untuk tanya orangtua apakah memiliki KIS atau tidak gitu mas, lalu malamnya saya tanya ibu saya dan ternyata saya punya mas, lalu jika punya fotokopikan dan diberikan kesekolah mas, tapi punya gak punya harus tetap mengumpulkan data keluarga mas, hanya saja dihimbau kalau punya sekalian dilampirkan. Terus pas pengambilan rapor kalau tidak salah orangtua saya dijelaskan secara langsung apa itu KIP kemudian berapa bulan setelah itu saya dipanggil sekolah dan disuruh ngambil KIP mas dan lengkapi data lagi kalau ga salah inget mas. Setelah itu ibu saya disuruh ke bank mas membawa KIP nya juga, dan sampai sekarang saya masuk SMA Alhamdulillah memang ada tambahan dana dari pemerintah melalui KIP itu mas untuk biaya saya sekolah.”

Kemudian paparan yang diberikan oleh Desi Fitriani, siswa tidak memiliki KIP, sebagai berikut:

“Saya kebetulan memang satu sekolah dengan Wiwin mas sejak SMP hingga saat ini. Memang dulu saat kami SMP ada himbauan seperti Wiwin katakana mas, hanya saja keluarga saya memang tidak memiliki KIS mas, jadi ya setau saya sudah saya hanya berikan data keluarga saja. Orangtua saya juga tidak terlalu

mengerti mengenai KIP mas, hanya mendengar beberapa dari orangtua teman saya yang mendapatkan dana bantuan, dan ikut saat sekolah mengadakan sosialisasi mas.”

Gambar 5.12
Kartu Indonesia Pintar



Sumber: Kamera peneliti

Berdasarkan penjelasan yang berasal dari Bapak Wahono, Ibu Nur, dan siswa bernama Wiwin Kurnianingsih, dari paparan mereka dapat disimpulkan bahwa peran sekolah sudah cukup baik dalam menghimbau dan mensosialisasikan setiap anak didiknya dalam pemberitahuan Kartu Indonesia Pintar, selain itu dapat disimpulkan pula bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan baik dalam perannya untuk memferivikasi data yang diterimaa dari setiap sekolah yang nantinya dikirim kepada Dapodik untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan. Dalam hal ini satu narasumber yaitu Desi Fitriani yang tidak memiliki KIP menjelaskan bahwa orangtuanya sudah mengetahui akan himbauan sekolah

mengenai KIP dan secara sadar memang tidak mendaftarkan anaknya tersebut untuk mendapatkan KIP.

Setelah mengetahui penjelasan beberapa narasumber dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Cilacap dalam Program Indonesia Pintar dapat dikatakan cukup baik dan sebagai salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Cilacap dalam mendukung empat peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat sebagai faktor pendukung utama peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap tidak akan dapat dikatakan cukup baik. Pertama dalam peran mengusulkan peserta didik calon penerima PIP, tanpa adanya partisipasi masyarakat yang ingin atau belum terdaftar maka pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya mendapatkan data lama dari sekolah tanpa adanya data baru atau perubahan, baik itu perubahan penambahan peserta didik maupun pengurangan calon peserta didik. Kedua, tanpa adanya partisipasi masyarakat, sosialisasi baik yang dilakukan oleh pihak Dinas maupun pihak sekolah tidak akan berjalan secara maksimal, mengingat bahwa tujuan utama dalam suatu program pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam hal pengaduan kepada pihak-pihak terkait program, maka kita tidak dapat mengetahui sejauh mana peran Dinas dalam menjalankan perannya dalam hal melayani dan menghimpun pengaduan masyarakat, dan terakhir tanpa adanya partisipasi masyarakat pihak Dinas tidak akan dapat memantau dan

mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan penyaluran dana Program Indonesia Pintar khususnya di Kabupaten Cilacap sudah berjalan.